

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pt.Bulan Bintang Tt).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Harahap, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika,Cet. V, 2009.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*.
- MD, Mahfud. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.
- MS, Burhani dan Lawrens, Hasbi. *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, tt.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra, cet. I, 1993.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib juz 7*. Bandung: PT. Al Ma'arif, cet. 12, 1996.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. *Sahih Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Shiddieqy(Ash), T.M. Hasi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Sutantio, Retno Wulan dan Kartawinata, Iskandar Oerip. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Syaifuddin, Muhammad, et al.. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Asek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sema No. 5 Tanggal 20 April 1959 Dan Nomor 1 Tahun 1962 Tertanggal 7 Maret 1962.

UU No. 53 Tahun 2010

UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 20.

Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1110/Pdt.G2013/PA. Mlg.

Murtadlo, *Wawancara*, Malang, 16 Mei 2014

Munasik, *Wawancara*, Malang, 16 Mei 2014